

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Menilik Representasi Perempuan dalam Pemilu 2024

Felia Primaresti
Peneliti Bidang Politik

Ada Apa dengan Perempuan dan Pemilu 2024?

Berdasarkan analisis dari data DCT KPU, terdapat penurunan kandidasi perempuan di tahun 2019 yang sebesar 40% menjadi 37% di tahun 2024.

KPU di tahun 2024 mengeluarkan kebijakan pembulatan ke bawah terhadap kebijakan afirmatif 30%. Hal ini membuat kandidat perempuan menjadi berkurang.

Catatan penelitian CSIS (2024) menunjukkan sebanyak 45% perempuan yang berhasil lolos ke parlemen, terafiliasi oleh dinasti politik.

Apa yang Bisa Kita Baca Sementara?

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Penurunan persentase kandidasi perempuan dari 40% di 2019 menjadi 37% di 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang dicalonkan (2019 sebanyak 3194, sementara 2024 sebanyak 3676), ada indikasi bahwa partai politik tetap menaikkan kandidasi laki-laki dengan lebih cepat (2019 sebanyak 4774, sementara 2019 sebanyak 6241) sehingga persentasenya secara proporsional menurun.

Komitmen untuk mendukung representasi perempuan yang sifatnya masih simbolis bukan substantif bahkan diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu.

Persentase perempuan yang terasosiasi dengan politik dinasti (sekitar 45%) menunjukkan bahwa ada ketimpangan akses perempuan di dunia politik, serta praktik-praktik klientelisme dan relasi kekerabatan, bukan karena keberhasilan sistem rekrutmen yang adil dan berbasis meritokrasi.

Dari Sudut Pandang Apa Penelitian Ini Melihat Lebih Dalam?



Bagaimana **realisasi dari representasi perempuan** dalam Pemilu 2024 oleh partai politik?

Bagaimana **dinamika internal dan strategi partai politik** dalam Pemilu 2024 ditinjau melalui aspek kelembagaan?

Bagaimana **tantangan dan hambatan partai politik** dalam menerapkan strategi memengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan di Pemilu 2024 dan representasi substantif secara keseluruhan?

Bagaimana Menjawab Pertanyaan Tadi?

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara untuk mengumpulkan datanya. Adapun yang diwawancara adalah PSI, NasDem dan PKS namun yang mengonfirmasi dan bersedia diwawancara hanya PSI.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Tabel. 1 Tiga Pilar Institusi

	Regulatif	Normatif	Kultural-Kognitif
Dasar Kepatuhan	Kepatutan	Kewajiban sosial	Diterima sebagai hal yang wajar Pemahaman bersama
Dasar tekanan	Aturan regulatif	Harapan yang mengikat	Skema konstruktif
Mekanisme	Koersif	Normatif	Mimetik

8

Indikator	Aturan Hukum Sanksi	Sertifikasi Akreditasi	Keyakinan umum Logika tindakan bersama Isomorfisme
Afeksi	Ketakutan Rasa bersalah	Malu/kehormatan	Kepastian/kebingungan
Dasar legitimasi	Disahkan secara hukum	Diatur secara moral	Dapat dipahami Dapat dikenali Didukung secara budaya

Sumber: Scott (2014). "Institutions and organizations: Ideas, interests, and identitie. Journal of Organizational Behavior, 36(1), 94-110.

Bagaimana realisasi dari representasi perempuan dalam Pemilu 2024 oleh partai politik?

Ketidaksesuaian antara Kebijakan dan Implementasi dalam Representasi Perempuan

Kesenjangan antara regulasi formal terkait representasi perempuan dalam AD/ART partai dengan implementasinya. Meskipun NasDem mencantumkan klausul keterwakilan perempuan, implementasinya masih lemah. Sebaliknya, PSI yang tidak mencantumkan aturan eksplisit justru memiliki keterwakilan perempuan lebih tinggi di tingkat kepengurusan pusat, meskipun dengan inkonsistensi di ranah elektoral.

Kesenjangan Peran Strategis Perempuan dalam Struktur Partai

Posisi strategis, seperti Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, masih didominasi oleh laki-laki di ketiga partai (PSI, NasDem, dan PKS). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan belum mencapai tingkat substantif, di mana perempuan memiliki peran penting dalam menentukan strategi politik dan pemilu.

Ketidaksesuaian antara Kebijakan dan Implementasi dalam Representasi Perempuan

Perempuan cenderung ditempatkan di bidang-bidang yang dianggap sesuai dengan peran gender stereotip, seperti ketahanan keluarga atau pemberdayaan perempuan, alih-alih di posisi strategis yang memengaruhi kebijakan utama partai. Fenomena ini memperkuat stereotip gender dan membatasi peluang perempuan untuk memengaruhi keputusan politik yang lebih signifikan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Bagaimana dinamika internal dan strategi partai politik dalam Pemilu 2024 ditinjau melalui aspek kelembagaan?

Regulatif

Meski ada regulasi nasional terkait kuota perempuan, implementasi di internal partai (PKS, PSI, NasDem) masih terbatas. Mekanisme sanksi dan insentif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan belum diterapkan secara sistematis, membuat aturan lebih bersifat simbolis tanpa dorongan pelaksanaan nyata.

Normatif

Perempuan masih ditempatkan dalam peran tradisional seperti pendidikan atau ketahanan keluarga, dengan norma-norma gender yang memperkuat stereotip. Posisi strategis dalam pengambilan keputusan tetap didominasi laki-laki, menunjukkan bahwa budaya internal belum mendukung keterlibatan perempuan secara substantif.

Kultural-Kognitif

Representasi perempuan sering dipahami hanya sebagai pemenuhan kuota formal, bukan upaya nyata untuk memberdayakan perempuan di posisi strategis. Dominasi dinasti politik juga menunjukkan bahwa partai lebih mengutamakan hubungan kekuasaan tradisional, membatasi inovasi dan perubahan kebijakan berbasis gender.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Bagaimana tantangan dan hambatan partai politik di Pemilu 2024 dan representasi substantif perempuan secara keseluruhan?

Simbolisme Representasi

Partai politik cenderung melihat representasi perempuan hanya sebagai pemenuhan kuota, bukan upaya substantif. Hal ini membatasi peran strategis perempuan dalam pembuatan kebijakan dan strategi pemenangan Pemilu, sehingga isu-isu perempuan kurang terakomodasi secara efektif.

Kesenjangan Regulasi dan Praktik

Ketidaksesuaian antara regulasi formal (UU dan AD/ART) dan praktik nyata memperkuat pola simbolisme dan kurangnya keterlibatan perempuan di posisi strategis seperti Bappilu..

Dominasi Laki-Laki dan Stereotip Gender

Posisi kunci dalam partai masih didominasi laki-laki, dan perempuan sering ditempatkan dalam peran yang stereotipikal. Dominasi ini, ditambah dengan koneksi dinasti politik, menghambat independensi dan kontribusi substantif perempuan, menjadikan mereka sekadar perpanjangan kekuasaan maskulin.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Kesimpulan

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

1. **Keterbatasan Pilar Regulatif**
Meskipun partai telah memenuhi kewajiban formal kuota 30%, aturan seperti AD/ART tidak disertai mekanisme sanksi atau insentif yang tegas. Kelemahan pengawasan menyebabkan keterwakilan perempuan hanya sebatas formalitas, tanpa implementasi substansial.

2. **Bias Normatif dan Marginalisasi Peran Strategis**
Norma internal partai masih menempatkan perempuan di sektor "tradisional" dengan peran minim dalam pengambilan keputusan strategis. Representasi perempuan dipenuhi untuk kepatuhan regulasi, bukan demi perubahan budaya politik yang inklusif.

3. **Isomorfisme dan Dominasi Pilar Kultural-Kognitif**
Partai lebih fokus meniru aturan eksternal tanpa menginternalisasi nilai representasi substantif. Kandidat perempuan sering dipilih berdasarkan popularitas atau hubungan dengan elit, memperkuat dominasi laki-laki dan menghalangi perempuan untuk menjadi agen perubahan independen.

Rekomendasi

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

1. Penguatan AD/ART dan Sanksi/Reward.
2. Audit Tahunan dan Akuntabilitas.
3. Pelatihan Gender dan Kampanye Publik.
4. Penempatan Perempuan di Posisi Strategis.
5. Pengawasan Internal dan Pendisiplinan.
6. Peningkatan Advokasi dan Pengumpulan Data Internal.


THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
Terima
Kasih!